



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : | /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam memverifikasi, mengkompilasi dan menyusun permintaan sekaligus pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (Ls) Gaji di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta uraian tugas dan kewenangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara untuk membantu meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 1 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

TENTANG NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

**A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nama	:	Yorgens Lievel Domisions Adoe, SH
NIP.	:	19740329 200903 1 001
Pangkat/ Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda
Unit Kerja	:	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangan :

1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
3. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO**

<b>NO</b>	<b>NAMA BIRO</b>	<b>JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>
1.	Biro Umum	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Erikh Benydkita Mella, SH NIP. 19730210 200112 1 006
		2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Maria Goreti Utomo, A.Md NIP. 19790826 201001 2 015
2.	Biro Administrasi Pimpinan	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Prisilia Q. Parera, SE NIP. 19760303 200112 2 002
		2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Maria Helena Djabur, S.IP NIP. 19830309 201001 2 031

NO	NAMA BIRO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA DAN NIP
3.	Biro Organisasi	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Djoese Selestino Martins Naibuti, S.Pt, M.Si NIP. 19710329 199903 1 002 Arnoldus Ranung, SE NIP. 19850618 201502 1 001
4.	Biro Hukum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Lukas Nikolas Mau, SH NIP. 19770910 200501 1 008 Elisabeth Ros Bulen, S.Kom NIP. 19941223 202202 2 003
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp NIP. 19750308 199903 1 004 Maglon Teuf, S.Kom NIP. 19841031 201001 1 009
6.	Biro Pemerintahan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 19701229 199003 1 005 Abner Biner Boimau, SH NIP. 19730320 199903 1 006
7.	Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Alexander B. Koroh, MPM NIP. 19700427 199003 1 005 Ariance P. L. Lapailaka, SE, MM NIP. 19790413 201212 2 001

Tugas dan wewenang :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran.

#### C. BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Theresia Marselina Kiik, SE  
 NIP. : 19791108 201001 2 014  
 Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
 Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan  
 Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan wewenang :

1. melakukan proses pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

**a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 NUSA TENGGARA TIMUR,**



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		R
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		X